

## RAPERDA APBD 2024 SENILAI RP 1,9 TRILIUN DISETUJUI DPRD BATANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Persetujuan-Raperda-APBD-2024-Pemkab.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - DPRD bersama Penjabat (Pj) Bupati Batang menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1,9 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp1,95 triliun.

Nominal tersebut naik cukup signifikan dibanding nominal pengajuan anggaran pendapatan sebesar Rp1,78

triliun, sementara anggaran belanja sebesar Rp 1,84 triliun.

“Proses penyusunan APBD merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik dalam setiap proses pembahasan. Agar menghasilkan kebijakan dan program kegiatan yang tepat dan bermanfaat,” tutur Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut, Lani menjelaskan, dari APBD yang disepakati terdapat defisit sebesar Rp 54 miliar.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp61,5 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp 7,5 miliar.

Sedangkan surplus pembiayaan sebesar Rp 54 miliar yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Hasil persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

"Untuk mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang hasilnya nanti akan segera kita tindaklanjuti bersama.

Hasilnya evaluasi gubernur nanti akan segera kita tindaklanjuti bersama, sehingga Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” terang Lani.

Sementara itu, Ketua DPRD Batang Maulana Yusup mengapresiasi dan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Terimakasih atas kebersamaannya dalam setiap pembahasan, baik di tingkat Komisi maupun Badan Anggaran,” ujarnya.

Maulana Yusup berharap, pada tahun anggaran 2024, pemerintah daerah bisa meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD. Hal itu harus terus diupayakan dan menggali potensi untuk peningkatan pendapatan,” pungkasnya.(din)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/08/raperda-apbd-2024-senilai-rp-19-triliun-disetujui-dprd-batang>, “Raperda APBD 2024 Senilai Rp 1,9 Triliun Disetujui DPRD Batang”, tanggal 7 November 2023.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11653>, “Raperda APBD 2024 Rp1,9 Triliun Dapat Persetujuan DPRD Batang”, tanggal 8 November 2023.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*